

## **10) Urusan Perhubungan**

### **a) Capaian Kinerja Urusan Perhubungan**

#### **(1) Kondisi Umum**

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Sektor perhubungan mempunyai peran dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/barang baik dalam wilayah Kabupaten Bantul maupun dengan wilayah sekitarnya. Dalam rangka mendukung pergerakan orang dan/barang tersebut maka harus disediakan fasilitas angkutan umum untuk orang dan/barang yang sesuai dengan standar keselamatan jalan. Transportasi di kabupaten Bantul menjadi bagian penting yang menentukan arah pembangunan di Kabupaten Bantul yang mengedepankan sektor wisata, pendidikan dan budaya, oleh karena itu transportasi harus direncanakan dan dilaksanakan untuk mempercepat laju pembangunan dengan mengedepankan keselamatan.

Dalam rangka memantau kondisi jaringan transportasi di Kabupaten Bantul, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul melakukan survei kinerja ruas jalan yang dilaksanakan pada setiap tahun. Kinerja ruas jalan diukur menggunakan besarnya volume kendaraan per kapasitas yang terjadi sebagai perbandingan dari volume lalu lintas dan kapasitas ruas jalan. Kinerja ruas jalan digunakan sebagai indikator tingkat pelayanan jalan dari ruas jalan tertentu yang

menunjukkan tingkat kelancaran sebuah ruas jalan. Kepadatan ruas jalan di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan yang disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah kendaraan di Kabupaten Bantul yang meningkat secara signifikan sedangkan penambahan panjang jalan di Kabupaten Bantul cenderung terbatas.

Pada Tahun 2023 Dinas Perhubungan melaksanakan 3 program, 14 Kegiatan, dan 40 Sub Kegiatan. Dinas Perhubungan mengelola anggaran belanja sebesar Rp. 33.741.762.969,- dan pendapatan sebesar Rp. 2.007.144.500,-.

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah meningkatnya keselamatan lalu lintas, dengan indikator kinerja utama persentase penurunan kecelakaan lalu lintas.

**Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD (2026)**

No	Indikator Kinerja Sasaran*	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian terhadap target akhir RPJMD 2026 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	persen	10,7	3,66	32,75	894,80	9,15	357,92

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2022

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. adanya fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai;
- b. adanya penegakan hukum oleh kepolisian;

- c. perkembangan teknologi transportasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan;
- d. adanya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun faktor penghambat tercapainya indikator tersebut adalah

- a. Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah;
- b. Terbatasnya fasilitas/sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas;
- c. Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi;
- d. Menurunnya jumlah angkutan umum;
- e. Belum adanya *Road Hazard Mapping*.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 3,66, realisasi sebesar 32,75, tercapai 894,80% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 10,7% atau tercapai sebesar 306,07%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 588,73%. Realisasi yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya karena pada tahun 2022 data laka yang kami peroleh dari Polres adalah data yang belum terpilah, sehingga data tersebut harus dipilah terlebih dahulu, sedangkan data pada tahun 2023 adalah data yang sudah terpilah sesuai status jalan sesuai kewenangan daerah.

## (2) Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

- a. Penurunan kualitas dan kuantitas sarana angkutan umum;
- b. Peningkatan kepadatan lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu;

- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas;
- d. Pengadaan prasarana keselamatan lalu lintas belum sesuai dengan lokus yang diprioritaskan.

- **Solusi**

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana angkutan umum dengan:
  - Sosialisasi terhadap awak angkutan umum dan masyarakat
  - Rehabilitasi sarana dan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum terutama pada penyediaan prasarana halte dan terminal tipe C yang layak
  - Mengupayakan menambah jalur Trans Jogja untuk menarik masyarakat agar menggunakan angkutan umum dan Trans Jogja
  - Melaksanakan sosialisasi aturan yang berlaku terkait standar pelayanan angkutan umum kepada penyelenggara angkutan umum. Dinas Perhubungan tidak akan mengeluarkan kartu pengawasan untuk kendaraan yang tidak sesuai dengan pelayanan standar minimal armada angkutan ketika armada tersebut tidak layak beroperasi. Penilaian yang digunakan adalah adanya dokumen KIR layak uji yang masih berlaku dari Dinas Perhubungan yang menyatakan bahwa kendaraan laik jalan dan usia kendaran
- b. Untuk mengatasi peningkatan kepadatan lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu dilakukan upaya sebagai berikut:
  - Melakukan koordinasi dengan Polres dalam upaya penanganan peningkatan arus yang

- terjadi pada event tertentu dengan rekayasa manajemen lalu lintas
- Melakukan peremajaan prasarana guna melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas berupa *traffic cone*, *road barrier*, rambu portable dan tali pembatas
  - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian parkir
  - Melaksanakan *pam insidental* dalam rangka pengamanan lalulintas pada event tertentu
- c. Untuk permasalahan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas dilakukan upaya sebagai berikut:
- Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat melalui berbagai media. Kelompok masyarakat yang akan disosialisasi adalah pelajar dan masyarakat umum
- d. Untuk permasalahan pengadaan prasarana keselamatan lalu lintas belum sesuai dengan lokus yang diprioritaskan dilakukan upaya sebagai berikut:
- Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (*rambu*, *marka*, *APILL*, *guardrail*, *flashing lamp* dll) serta fasilitas pendukung keselamatan berupa LPJU
  - Menyusun masterplan kebutuhan prasarana keselamatan lalu lintas

**b) Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Alokasi anggaran Urusan Perhubungan tahun 2023 sebesar Rp. 33.741.762.969,- yang dibagi dalam 3 program, 14 kegiatan, dan 40 sub kegiatan. Realisasi belanja tahun 2023 adalah Rp. 33.162.180.008,- atau 98,28% dan realisasi fisik

sebesar 100%. Deviasi sebesar 1,72% karena ada efisiensi belanja berupa sisa hasil pengadaan. Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 1,72%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Selanjutnya rincian capaian kinerja program kegiatan dan sub kegiatan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan*	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Urusan pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	80,75	82,68
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	100
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	100
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	48	48
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	3
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	5	5

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan*	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
					Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persen	100	100
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	5	5
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	100
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	100
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	8
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	20
				Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Paket	16	16

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan*	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				dan Penggandaan	Disediakan			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	1	1
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	20	20
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	186	186
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	4
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	11	11
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
				Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	2	2

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan*	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Sumber Daya Air dan Listrik	Air dan Listrik yang Disediakan			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7	7
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Persen	100	100
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	21	21
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	33
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Rasio Konektivitas Kabupaten Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Persen	30,43	38,46

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan*	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				JALAN (LLAJ)				
					Kinerja lalu lintas Kabupaten	Angka	0,3	0,36
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	Persen	18,19	18,19
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	1.278	1.278
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	800	2932
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C	Persen	40	40
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	4	4
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor	Persen	51	51

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan*	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	1.200	1.200
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	1.000	1.000
				Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	2
				Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan	1	1
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	10	10
				Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	4	4
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Persen	51,39	51,39
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Laporan	5	5

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan*	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota			
				Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	325	325
				Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	4	4
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi	Persen	34,1	34,1
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	3	3

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan*	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Umum Jaringan Trayek	Angka	56,5	56,5
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ijin Trayek	Angka	0,28	0,28
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	1	1
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persen	100	100

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan*	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten	Persen	100	100
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Rambu Lalu Lintas, Papan Himbauan Keselamatan Lalu Lintas, RPPJ	Unit	86	86
					LPJU	Unit	9	9
					Dokumen Perencanaan dan Pengawasan	Dokumen	4	4
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen	2	2